

DAKWAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN

Ahmad Zaini

STAIN Kudus

Email: zaini78@stainkudus.ac.id

Abstract

This paper aims to determine the activities of da'wah in changing the economic, social, cultural, educational and political conditions of rural residents through community empowerment in the frame of da'wah . Namely da'wah that can improve the quality of faith as well as the quality of life target da'wah . The results of this literature review indicate that there are several forms to empower communities through political, economic, socio-cultural and environmental empowerment. The techniques for improving the situation can be done through non-participation techniques, tokenism techniques, and community participation/power techniques. The participation in government, preachers, community, and da'wah organizations in bridging the mission of community empowerment is an urgent thing to be synergized so that the goal of da'wah can succeed maximally .

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kegiatan dakwah dalam mengubah keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik warga perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bingkai dakwah. Yakni dakwah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan sekaligus kualitas hidup sasaran dakwah. Hasil dari kajian literatur ini menunjukkan bahwa ada beberapa bentuk untuk memberdayakan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan politik, ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan. Adapun teknik untuk memperbaiki keadaan tersebut dapat dilakukan melalui teknik non-partisipasi, teknik tokenisme, dan teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat. Peran serta pemerintah, pendakwah, masyarakat, dan organisasi dakwah dalam menjembatani dakwah pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang urgen untuk disinergikan agar tujuan dakwah dapat berhasil secara maksimal.

Kata kunci: dakwah, pemberdayaan masyarakat, perdesaan.

A. Pendahuluan

Dakwah merupakan fardu kifayah jika dilakukan di negara-negara yang ada para pendakwah telah menegakkannya. Karena setiap negara atau wilayah membutuhkan dakwah secara kontinyu, maka dalam keadaan seperti ini, dakwah menjadi fardu kifayah, yaitu apabila telah dilakukan oleh sekelompok orang, beban kewajiban itu gugur dari yang lain. Pada saat itu, dakwah bagi yang lain menjadi sunah muakadah dan merupakan amal saleh. Dakwah bisa menjadi fardu 'ain apabila di suatu tempat tidak ada orang yang melakukannya¹.

Dakwah yang dilakukan oleh para pendakwah memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan petunjuk al-Quran dan hadis. Secara umum dakwah bertujuan agar manusia memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Secara lebih jelasnya tujuan yang ingin dicapai dalam proses dan aksi dakwah menurut Muhyiddin² diantaranya adalah: pertama, konsep *dar al-salam* yang merupakan konsep dari Islam sendiri. Dakwah dilakukan mestinya menjadi alat dan cara agar manusia hidup damai dan harmonis dalam proses interaksi satu dengan lainnya. Gerakan dakwah melalui kekerasan dan pemaksaan yang dilakukan oleh sekelompok umat Islam jelas akan mengganggu proses dakwah itu sendiri. Kedua, dialog dan menghindari ikrah. Globalisasi budaya yang melanda dunia, tantangan dan masalahnya sangat dirasakan umat Islam. Menolak secara penuh arus globalisasi jelas merupakan tindakan tidak realistis, namun menerima penuh arus globalisasi budaya dapat berimplikasi pada kerusakan mental dan budaya, karena tidak berakar pada *wisdom* umat Islam. Karenanya, cara yang elegan adalah melakukan dialog dengan berbagai unsur yang ada.

Ketiga, konsep integral. Konsep integralisme dalam dakwah adalah bahwa dakwah mesti mempertimbangkan sudut-sudut persoalan dakwah, kemampuan kapasitas, dan target-target dakwah yang lebih realistis. Dakwah harus dilakukan secara komprehensif, meskipun dakwah demikian memerlukan ketelitian dan kesabaran dari berbagai unsur yang berkepentingan dalam perbaikan umat. Keempat, pelaksanaan dakwah mesti menjawab tantangan dan problem sosial. Perubahan sosial-budaya pada era informasi yang ditunjang dengan kemajuan teknologi, persoalan-

¹ Jum'ah Amin Abdul Aziz, *Fiqh Dakwah: Prinsip dan Kaidah Asasi Dakwah Islam*, terj. Abdus Salam Masykur, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 36.

² Asep Muhyiddin, "Dakwah Perspektif al-Quran", *Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, Asep Muhyiddin, dkk. (ed.), (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 28-29.

persoalan kemanusiaan makin terbuka pada hampir setiap lini kehidupan. Karenanya, dakwah harus dapat menjawab tantangan perubahan sosial-budaya tersebut.

Berdakwah tidak mesti disampaikan melalui mimbar, ada kalanya dakwah juga memerhatikan kebutuhan sasaran dakwahnya (*mad'u*), dengan istilah lain selain meningkatkan kualitas keimanan, dakwah juga diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup umat yang didakwahi, karena sasaran dakwah memiliki problem yang beragam. Dari sisi geografis, sasaran dakwah ada yang berdomisili di perkotaan maupun perdesaan. Semisal berdakwah di perdesaan, maka para pendakwah/dai mesti mengetahui budaya, adat istiadat, dan tradisi yang berlaku di tempat tersebut, memiliki data dan informasi tentang mata pencaharian/profesi penduduknya, serta yang tidak kalah pentingnya adalah memerhatikan kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi. Umumnya masyarakat perdesaan memang hidup dari hasil pertanian dan ekonominya menengah ke bawah. Karenanya, dakwah di wilayah perdesaan seyogyanya dapat mengubah keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan politik masyarakatnya sehingga mereka memiliki kekuatan untuk bangkit dari keterbelakangan.

Sejumlah studi menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin dan termiskin di perdesaan masih cukup banyak. Mereka menjadi komunitas dengan struktur dan kultur perdesaan. Kira-kira separuh dari jumlah itu benar-benar berada dalam kategori sangat miskin. Kondisi mereka sungguh memprihatinkan, antara lain ditandai oleh *malnutrition*, tingkat pendidikan yang rendah dan rentan terhadap penyakit. Sementara itu, sisanya memiliki kondisi yang agak lebih baik daripada kelompok dalam kategori sangat miskin itu, meskipun tentu saja tetap berkategori miskin. Mereka masih dililit oleh ketidakberdayaan.³

Keadaan masyarakat perdesaan tersebut tidak dapat dengan mudah didakwahi secara konvensional, sebaliknya kebutuhan mereka harus terlebih dahulu dipenuhi baru dilanjutkan dengan transmisi nilai-nilai agama kepada mereka. Seperti dijelaskan oleh Achmad⁴ ketika dakwah dihadapkan pada masalah kemanusiaan, maka dakwah diharuskan dapat memberikan jawaban yang menyangkut kepentingan manusia dalam

³ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 30-31.

⁴ Amrullah Achmad, "Dakwah Islam dan Perubahan Sosial: Suatu Kerangka Pendekatan dan Permasalahannya", *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, Amrullah Achmad (ed.), (Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M), 1985), hlm. 16.

berbagai segi kehidupan. Penataan lembaga dakwah dimulai kembali, perumusan pesan ditinjau kembali, penanganan masalah secara kongkrit harus dikedepankan, secara keseluruhan sistem dakwah mesti ditinjau kembali baik efektivitas, efisiensi maupun jangkauan penanganan masalah yang dihadapi. Karena tanpa upaya yang berkesinambungan dalam pemikiran sistem dakwah, Islam semakin tidak mengakar dalam sistem sosial-budaya yang pada akhirnya, masalah kemanusiaan yang paling fundamental tidak dapat segera tertangani dengan tuntas.

Pandangan Achmad di atas senada dengan Usman⁵ yang menyatakan bahwa sebagian pakar sosial percaya bahwa pesan atau kandungan ajaran agama dalam proses dakwah dimungkinkan untuk memacu perubahan. Dalam konteks pandangan semacam ini, agama bukan merupakan elemen yang pasif dalam proses perubahan sosial. Sebaliknya, agama adalah elemen aktif dalam membentuk suatu proses sosial. Dengan istilah lain, bahwa agama dapat memainkan peran yang penting bagi kelahiran struktur sosial baru. Bahkan lebih dari itu, dalam sejarah politik telah ditunjukkan bahwa agama dapat menjadi pemicu untuk menggerakkan perubahan politik.

Sedang menurut Mahfudh⁶ kegiatan dakwah pada dasarnya adalah memberikan motivasi kepada orang lain sehingga perlu memerhatikan kebutuhan kelompok sasaran. Apalagi tujuan dakwah adalah tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Sesungguhnya dakwah dalam pengertian ini adalah memberdayakan masyarakat atau umat. Masih menurut Mahfudh⁷ bahwa dalam teori kebutuhan dikenal adanya hierarki kebutuhan. Dimulai dari *kebutuhan fisik* semisal gaji, upah, tunjangan, sewa rumah, dan sebagainya, *kebutuhan keamanan* semisal jaminan masa tua, santunan kecelakaan, dan asuransi kesehatan, *kebutuhan sosial* seperti menjadi anggota kelompok organisasi atau yayasan, *kebutuhan penghargaan* semisal status sosial, promosi, perjamuan, *kebutuhan aktualisasi diri* semisal menjadi tokoh yang dikenal.

Berkaca pada teori kebutuhan tersebut, maka dakwah selain untuk menumbuhkan kesadaran beragama juga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang prinsipil. Dengan demikian, para pendakwah diharuskan mengetahui kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya dan dicarikan solusinya sehingga dapat meningkatkan kualitas hidupnya baik dari segi ekonomi, sosial, budaya, politik dan pendidikan. Sesudah mengetahui hal-hal yang harus dipenuhi oleh masyarakat, maka

⁵ Sunyoto Usman, *Pembangunan...*, hlm. 184.

⁶ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2011), hlm. 106.

⁷ *Ibid.*

langkah selanjutnya adalah bagaimana cara mengubah keadaan mereka tersebut melalui pengembangan dan pemberdayaan masyarakat agar kebutuhan dasarnya dapat terpenuhi.

Terlebih pada masyarakat pedesaan, umumnya keadaan ekonomi warga pedesaan berada pada posisi menengah ke bawah. Tidak mungkin untuk pertama kalinya para pendakwah menceramahi mereka, sebaliknya masyarakat akan menjauhinya. Para pendakwah mesti dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu baru kemudian dapat dilanjutkan untuk menyampaikan masalah kerohanian. Karena itu, tulisan ini ingin membahas kegiatan dakwah dalam mengubah keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik warga pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat dalam bingkai dakwah. Yakni dakwah yang dapat meningkatkan kualitas keimanan sekaligus kualitas hidup sasaran dakwah.

B. Pembahasan

1. Bentuk Dakwah

Dakwah secara bahasa diartikan sebagai mengajak, menyeru dan memanggil. Di antara ayat al-Quran yang berisi tentang seruan dan ajakan termaktub dalam surat an-Nahl ayat 125. Ayat ini merupakan salah satu ayat al-Quran yang dikutip sebagai landasan normatif dalam berdakwah. Ayat tersebut didahului dengan kata kerja perintah yakni lafal *ud'u* yang berarti serulah. Merujuk pada ayat tersebut, dakwah ke jalan Allah dapat disampaikan dengan bermacam-macam cara dan metode, yakni: melalui hikmah, mauizah hasanah dan *mujadalah billati hiya ahsan* tergantung sasaran dakwah yang didakwahi.

Aziz⁸ menjelaskan bahwa secara garis besar paling tidak bentuk dakwah ada tiga, yakni: dakwah lisan (*da'wah billisan*), dakwah tulis (*da'wah bilqalam*), dan dakwah tindakan (*da'wah bilhal*). Masih menurut Aziz⁹ bahwa salah satu dakwah *bilhal* (dakwah tindakan) adalah metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya dengan dilandasi proses kemandirian. Metode ini selalu berhubungan antara tiga faktor, yaitu masyarakat, pemerintah dan agen (pendakwah).

⁸ Moh. Ali Aziz, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 359.

⁹ *Ibid.*, hlm. 378.

Sementara itu, Suhandang¹⁰ berpandangan bahwa dakwah *bilhal* adalah dakwah dengan menggunakan perbuatan atau teladan sebagai pesannya. Dakwah *bilhal* biasa juga disebut dakwah alamiah. Maksudnya, dengan menggunakan pesan dalam bentuk perbuatan, dakwah dilakukan sebagai upaya pemberantasan kemungkaran secara langsung (fisik) maupun menegakkan kebaikan seperti membangun masjid, sekolah atau apa saja yang mudah dikerjakan dan bersifat mewujudkan pelaksanaan syariat Allah swt. dari segala aspeknya.

Adapun Aripudin¹¹ menegaskan bahwa dalam dakwah *bilhal* hubungan antara pendakwah dan sasaran dakwah bersifat kemitraan, bukan hubungan ketergantungan, sehingga diharapkan tumbuh masyarakat yang dapat berfikir kritis terhadap diri dan lingkungannya, mampu mencari solusi bagi problem yang dihadapinya. Nilai-nilai Islam ditransformasikan dalam tindakan nyata. Sehingga, eksistensi Islam benar-benar ada bagi kehidupan masyarakat yang membutuhkan.

Pada praktiknya agama memiliki banyak fungsi bagi umatnya. Setidaknya, ajaran agama yang disampaikan oleh para pendakwah kepada sasaran dakwah dapat memberikan efek yang positif bagi pemeluknya. Beberapa fungsi tersebut diantaranya:

- a. Berfungsi edukatif. Para penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipenuhi. Ajaran agama secara yuridis berfungsi menyuluh dan melarang. Kedua unsur suruhan dan larangan ini memiliki latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik.
- b. Berfungsi penyelamat. Keselamatan yang diberikan oleh agama kepada penganutnya adalah keselamatan yang meliputi dua alam yaitu: dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan pada penganutnya meliputi: pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan.
- c. Berfungsi sebagai perdamaian. Melalui agama seseorang yang bersalah atau berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya apabila seseorang pelanggar telah

¹⁰ Kustadi Suhandang, *Ilmu Dakwah: Perspektif Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 98.

¹¹ Acep Aripudin, *Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da'i terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ciremai*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 174.

- menebus dosanya melalui tobat, pensucian ataupun penebusan dosa.
- d. Berfungsi sebagai *social control*. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok, karena agama secara instansi merupakan norma bagi pengikutnya sedang secara dogmatis memiliki fungsi kritis yang bersifat profetis.
 - e. Berfungsi sebagai pemupuk rasa solidaritas. Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan: iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan.
 - f. Berfungsi transformatif. Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya.
 - g. Berfungsi kreatif. Ajaran agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Penganut agama dituntut untuk melakukan inovasi dan penemuan baru.
 - h. Berfungsi sublimatif. Ajaran agama mengkuduskan segala usaha manusia, bukan saja yang bersifat ukhrawi melainkan yang bersifat duniawi juga. Segala usaha manusia bila dilakukan karena niat yang tulus karena Allah dan tidak bertentangan dengan norma agama maka amal tersebut merupakan ibadah.¹²

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa ajaran agama yang disebarkan oleh para pendakwah memiliki bermacam-macam fungsi bagi umat yang diserunya. Dakwah yang berefek positif adalah dakwah yang dapat memberikan kedamaian dan ketenangan bagi umatnya, dakwah yang dapat mengubah rasa sedih menjadi rasa senang, dakwah yang dapat mengubah keadaan hidup yang terpuruk menjadi bermartabat hidupnya, dakwah yang bermanfaat bagi pribadi dan kelompok masyarakat secara luas, dakwah yang dapat membimbing umatnya ke jalan yang diridai Allah, dakwah yang bisa memberdayakan masyarakatnya agar dapat hidup secara bermartabat sehingga umat manusia dapat memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹² Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 325-327.

2. Pengertian Pedesaan

Pedesaan berasal dari kata desa. Kata yang berasal dari bahasa Jawa. Desa dalam bahasa etnik yang terdapat di Indonesia dikenal dalam berbagai istilah, seperti Batak disebut dengan *huta* atau *kuta*, Minangkabau dikenal dengan *nagari*, Aceh disebut sebagai *gampong*, Bugis dikenal dengan *matowa*, Makassar disebut dengan *gukang*, atau Minahasa disebut dengan *wanua*.¹³ Sedang dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*¹⁴ desa diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).

Jamaludin¹⁵ menjelaskan bahwa desa merupakan *self community*, yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang, terhadap penyelenggaraan otonomi daerah. Hal tersebut dengan otonomi desa yang kuat akan memengaruhi secara signifikan perwujudan otonomi daerah.

Sementara itu, Asy'ari seperti dikutip oleh Muhyidin dan Safei¹⁶ memaparkan bahwa desa dapat diartikan dengan mempertimbangkan beragam aspek, yaitu: morfologi, jumlah penduduk, ekonomi, sosial-budaya, serta hukum. Dari aspek morfologi desa ialah pemanfaatan lahan oleh penduduk yang bersifat agraris. Dari aspek jumlah penduduk, desa didiami oleh sejumlah kecil penduduk dengan kepadatan yang rendah. Dari aspek ekonomi, desa ialah wilayah yang masyarakatnya bermata pencaharian pokok di bidang pertanian, bercocok tanam atau nelayan. Adapun dari segi sosial-budaya, desa tampak dari hubungan sosial antarpenduduknya yang bersifat kekeluargaan, bersifat homogen dan gotong-royong.

Seperti diketahui, warga pedesaan merupakan suatu masyarakat yang memiliki hubungan lebih erat dan lebih mendalam ketimbang hubungan mereka dengan warga pedesaan lainnya. Sistem

¹³ Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 19.

¹⁴ Tim Penyusu Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 256.

¹⁵ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 7.

¹⁶ Asep Muhyiddin & Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm. 145.

kehidupan biasanya berkelompok atas dasar sistem kekeluargaan. Penduduk pedesaan pada umumnya hidup dari pertanian. Walaupun terlihat adanya tukang kayu, tukang genteng dan bata, tukang membuat gula, dan sebagainya. Namun, inti pekerjaan penduduk desa adalah pertanian. Umumnya penduduk pedesaan di Indonesia apabila ditinjau dari segi kehidupan, sangat terikat dan sangat tergantung dari tanah (*earth-bound*).¹⁷ Penghasilan yang bersumber dari tanah ini menjadi elan vital bagi kehidupan masyarakat pedesaan.

Di berbagai literatur, konsep desa dipersandingkan dengan kota. Sehingga ketika desa didiskusikan sebagai suatu konsep, maka biasanya terkait pula pembicaraan dengan konsep perkotaan atau kota. Setidaknya ada beberapa cara yang dilakukan oleh para ahli antara lain: satu, perbedaan statistik penduduk. Para ahli tidak bersepakat berapa jumlah penduduk atau warga apabila wilayah tersebut disebut sebagai desa. Namun dari beberapa pendapat yang ada, warga desa sekitar 2000 hingga 2500 orang. Dua, perbedaan relasi sosial. Para ahli mencoba membandingkan antara desa dan kota berdasarkan perbedaan dasar dan kualitas relasi sosial sosial. Misalnya relasi sosial di desa cenderung alamiah, intim, dan intens. Tiga, perbedaan infrastruktur ekonomi. Seperti halnya perbedaan statistik penduduk dan relasi sosial, para ahli membuat perbedaan antara desa dan kota berdasarkan landasan infrastruktur ekonomi yang ada. Para ahli cenderung menetapkan ciri desa dengan ekonomi pertanian, sedangkan kota dengan ekonomi industri.¹⁸

3. Karakteristik dan Ciri Khas Masyarakat Pedesaan

Wilayah pedesaan memiliki karakteristik yang berbeda dengan perkotaan, baik dari segi jumlah penduduk, adat istiadat, tradisi dan budaya yang melingkupinya. Satu desa dengan desa lainnya pun memiliki ciri khas dan karakter yang berbeda pula. Namun, menurut Jamaludin¹⁹ pada umumnya desa memiliki karakteristik sebagai berikut:

¹⁷ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 136-137.

¹⁸ Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Pedesaan*, hlm. 19.

¹⁹ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Pedesaan*, hlm. 25-26.

- a. Umumnya warga pedesaan hidup dalam situasi kemiskinan dengan mata pencaharian sangat bergantung pada kondisi geografis wilayahnya, semisal usaha tani, nelayan, ternak, kerajinan tangan dan pedagang kecil.
- b. Dalam kehidupan sehari-hari masih memegang teguh tradisi, nilai-nilai dan adat istiadat secara turun-temurun untuk memelihara kelangsungan hidup dan lingkungan.
- c. Secara psikologis, masyarakat desa cenderung memiliki sifat konservatif dan ortodoks, fatalis, dan suka curiga terhadap orang luar. Kendati demikian, masyarakat desa dapat bersikap hemat, cermat, dan menghormati orang lain yang terkadang sulit ditemukan di perkotaan.

Selanjutnya, masih menurut Jamaludin²⁰ beberapa ciri khas yang dapat mengilustrasikan penduduk desa adalah sebagai berikut:

- a. Kehidupan dan mata pencaharian di desa sangat erat hubungannya dengan alam.
- b. Pada umumnya anggota keluarga mengambil peran dalam kegiatan bertani dengan tingkat keterlibatan yang berbeda-beda.
- c. Masyarakat desa sangat terikat dengan lingkungan dan nilai-nilai yang dianutnya.
- d. Terbangunnya kekerabatan yang sangat kuat, pola kehidupan dan masyarakat yang saling bergantung, sehingga berkembang nilai-nilai gotong royong, kerja sama, perasaan sepenanggungan, dan tolong-menolong.
- e. Hidup di desa banyak berkaitan dengan tradisi, nilai, norma adat yang telah berkembang secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya, sehingga masyarakat desa cenderung dicap stagnan.
- f. Keterbukaan dan keterlibatan yang sangat erat dengan permasalahan rohani sangat kental.
- g. Ada sebagian masyarakat yang sangat meyakini nilai-nilai yang bersifat mistis sehingga tidak menerima hal-hal yang bersifat rasional dan kurang kritis.

Selain yang telah dijelaskan di atas, masyarakat pedesaan khususnya para orang tua memegang peranan penting dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Warga akan selalu meminta nasihat kepada mereka apabila ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kesukarannya adalah para golongan tua itu memiliki pandangan yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 26-27.

didasarkan pada tradisi yang kuat sehingga sukar untuk mengadakan perubahan-perubahan yang nyata. Pengendalian sosial masyarakat terasa sangat kuat sehingga perkembangan jiwa individu sangat sukar untuk dilaksanakan. Itulah sebabnya mengapa sulit sekali mengubah jalan pikiran yang sosial ke arah jalan pikiran yang ekonomis.²¹

Masyarakat pedesaan mempunyai sifat yang kaku tetapi sangatlah ramah dan biasanya adat dan kepercayaan masyarakat sekitar yang menyebabkan masyarakat pedesaan masih kaku, namun asalkan tidak melanggar hukum adat dan kepercayaan maka masyarakat pedesaan adalah masyarakat yang ramah. Pada hakikatnya, masyarakat pedesaan adalah masyarakat pendukung seperti sebagai petani yang menyiapkan bahan pangan, sebagai pekerjaan yang biasanya hanya bersifat pendukung tetapi terlepas dari itu masyarakat pedesaan banyak juga yang sudah berpikir maju dan keluar dari hakikat itu.²²

Karakteristik dan ciri khas masyarakat pedesaan tersebut menjadi tantangan dan sekaligus menjadi bahan pemikiran bagi para pendakwah untuk memikirkan metode yang tepat untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat ke arah yang lebih berkualitas dan bermartabat. Memberdayakan masyarakat dengan aset yang dimiliki tidak semudah yang dibayangkan. Diperlukan keseriusan, ketelatenan dan kesabaran dalam memberikan pengarahan dan masukan. Para pendakwah mesti mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan dialami oleh para warga pedesaan untuk kemudian mencarikan solusi yang tepat secara bermusyawarah dengan para warga.

4. Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pemberdayaan merupakan proses pematihan atau *breakdown* dari hubungan atau relasi antara subjek dengan objek. Proses ini mementingkan adanya "pengakuan" subjek akan "kemampuan" atau "daya" (*power*) yang dimiliki objek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya mengalirnya daya (*flow of power*) dari subjek ke objek. Pada akhirnya, kemampuan individu miskin untuk dapat "mewujudkan" harapannya dengan diberi "pengakuan" oleh subjek merupakan bukti bahwa individu tersebut mempunyai daya. Hasil akhir pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula

²¹ Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, hlm. 137-138.

²² Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 226.

objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain.²³

Jamaludin²⁴ menyatakan ada beragam bentuk untuk memberdayakan masyarakat, beberapa diantaranya: pertama, pemberdayaan politik, yang bertujuan meningkatkan daya tawar (*bargaining position*) yang diperintah terhadap pemerintah. *Bargaining* ini dimaksudkan agar yang diperintah mendapatkan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan dan kepedulian tanpa merugikan pihak lain.

Kedua, pemberdayaan ekonomi, diperuntukkan sebagai upaya meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen agar berfungsi sebagai penanggung dari dampak negatif pertumbuhan, pembayar risiko salah urus, pemikul beban pembangunan, kegagalan program, dan akibat kerusakan lingkungan.

Ketiga, pemberdayaan sosial-budaya, bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment* guna meningkatkan nilai manusia (*human dignity*), penggunaan (*human utilization*), dan perlakuan yang adil terhadap manusia. Keempat, pemberdayaan lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, agar pihak yang diperintah dan lingkungannya mampu beradaptasi secara kondusif dan saling menguntungkan.

Empat bentuk pemberdayaan di atas dalam konteks dakwah dapat dijelaskan sebagai berikut: dalam masalah politik, misalnya masyarakat diberikan pemahaman tentang pentingnya memilih pemimpin yang kompeten, kapabel, amanah, aspiratif atas kepentingan masyarakat dari sudut pandang ajaran Islam, sehingga masyarakat tidak terperdaya dengan iming-imingan sesaat ketika ada pemilu. Dalam masalah ekonomi, misalnya masyarakat diberdayakan dengan cara memberikan bantuan atau pinjaman lunak dari lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha ataupun memulai usaha. Dalam bidang sosial-budaya, masyarakat misalnya diberi pemahaman tentang masalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidupnya dalam menghadapi permasalahan kehidupan yang semakin kompleks. Dalam masalah

²³ Onny S Prijono & A.M.W. Pranarka, (ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996), hlm. 135.

²⁴ Adon Nasrullah Jamaludin, *Sosiologi Perdesaan*, hlm. 250.

lingkungan masyarakat pedesaan diberikan pengertian dan pemahaman tentang perawatan tanaman, pelestarian hutan, kebersihan sungai dan sebagainya sehingga masyarakat dapat hidup secara harmonis dengan alam di sekitarnya.

Selanjutnya, pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya dibuat menjadi lebih berdaya. Pokok pikiran dari teori pembangunan yang berpusat pada rakyat (*people centered development*) yang implementasinya dijabarkan ke dalam pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya. Kewenangan tersebut meliputi keseluruhan proses pembangunan sejak identifikasi masalah dan kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan menarik manfaat pembangunan.²⁵ Keikutsertaan masyarakat lokal terhadap proses ini, diharapkan masyarakat merasa diberikan perhatian dan akan membangkitkan kesadaran mereka dalam membangun desanya.

5. Dakwah dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan

Di atas telah dijelaskan bahwa salah satu bentuk dakwah adalah dakwah *bilhal*, yakni dakwah dengan aksi nyata. Dengan kata lain, dakwah *bilhal* merupakan metode pemberdayaan masyarakat, yaitu dakwah dengan memberdayakan aset yang dimiliki suatu komunitas atau kelompok masyarakat untuk kemudian dikembangkan sehingga masyarakat tersebut memiliki daya dan kemampuan untuk bangkit dari keterbelakangan, keterpurukan, dan ketidakberdayaan.

Dakwah *bilhal* secara mutlak harus dapat memahami kebutuhan sasaran dakwah. Seperti halnya berdakwah di kalangan masyarakat pedesaan yang sebagian warganya berada di bawah garis kemiskinan tidak akan efektif dengan hanya berceramah, namun akan lebih efektif bila dakwah dilakukan dengan membantu mereka untuk memenuhi kebutuhannya, memberikan makanan, pakaian dan yang terpenting lagi dapat memberdayakan mereka agar memiliki daya (*power*) untuk bangkit dari keterpurukan. Idealnya pengembangan dakwah yang efektif harus mengacu pada masyarakat untuk meningkatkan kualitas keislamannya, sekaligus juga kualitas

²⁵ Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 69.

hidupnya. Dakwah terhadap masyarakat pedesaan diharapkan dapat menumbuhkan etos kerja mereka. Inilah yang sebenarnya diharapkan oleh dakwah *bilhal*.²⁶

Dakwah pemberdayaan masyarakat lebih mengutamakan aksi ketimbang hanya wacana. Aksi dakwah pemberdayaan masyarakat biasanya masuk dalam bidang sosial, budaya, lingkungan, ekonomi, pendidikan, politik, pengembangan SDM dan sebagainya. Di pandang dari segi metode, paradigma dakwah pemberdayaan masyarakat berusaha mewujudkan Islam sebagai pijakan pemberdayaan dan perubahan sosial yang bersifat transformatif-emansipatoris. Islam dihadirkan untuk dapat mengubah, mengembangkan, dan memberdayakan manusia dengan segenapnya potensi yang dimilikinya sebagai pengejawantahan wakil Allah di muka bumi.²⁷

Untuk menerapkan pemberdayaan masyarakat sebagai salah satu bentuk dakwah *bilhal*, penjelasan Aziz²⁸ mengutip pendapatnya Sulistiyani tentang teknik pemberdayaan masyarakat dapat dijadikan sebagai rujukan. Beberapa di antara tekniknya adalah sebagai berikut:

- a. Teknik Non-Partisipasi. Bentuknya adalah dari pemerintah, oleh pemerintah, untuk rakyat. Dalam hal ini, masyarakat hanya menjadi objek dari program intervensi yang telah dirancang dan diimplementasikan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai dinamisator dan agen pendakwah sebagai evaluator. Agen (pendakwah) berada di luar program yang secara informal boleh menyampaikan kritik dan saran, tetapi pemerintah bebas mengabaikannya. Kepada masyarakat, para agen (pendakwah) memperkenalkan pemikiran tentang pemberdayaan melalui perkuliahan yang partisipatif, pemikiran konservatif masyarakat diubah menjadi lebih kritis. Penerapan teknik ini melalui tanya jawab, diskusi panel, dan lain-lain.
- b. Teknik Tokenisme. Bentuknya adalah dari pemerintah bersama rakyat untuk rakyat. Masyarakat seolah-olah diberi ruang partisipasi dengan menyampaikan pendapat, saran dan keberatan, namun sebenarnya hanya formalitas saja. Pemerintah berperan sebagai katalisator sedang agen (pendakwah) sebagai implementator. Agen (pendakwah) memberikan pendampingan,

²⁶ Munzier Suparta & Harjani Hefni, dkk. (ed.), *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 233.

²⁷ A. Ilyas Ismail & Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011), hlm. 227-228.

²⁸ Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, hlm. 378-379.

pengawasan, dan umpan balik. Penerapan teknik ini melalui dikusi kelompok kecil, studi kasus dan sebagainya.

- c. Teknik partisipasi/Kekuasaan Masyarakat. Bentuknya adalah dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Masyarakat telah mendapatkan tempat dalam suatu program pembangunan. Sejak perencanaan hingga evaluasi dilakukan oleh rakyat secara mandiri. Pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator, sedang agen pendakwah sebagai pendamping hingga programnya selesai. Target yang ingin dicapai adalah masyarakat dapat mandiri. Penerapan teknik ini melalui praktik, pengamatan peragaan serta kunjungan lapangan.

Menurut pandangan Mahfudh²⁹ implikasi dakwah *bilhal* terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- a. Masyarakat yang menjadi sasaran dakwah, pendapatannya bertambah untuk membiayai pendidikan keluarga atau memperbaiki kesehatan.
- b. Dapat menarik partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sebab masyarakat terlibat sejak perencanaan sampai pelaksanaan usaha dakwah *bilhal*.
- c. Dapat menumbuhkan atau mengembangkan swadaya masyarakat dan dalam proses jangka panjang bisa menumbuhkan kemandirian.
- d. Dapat mengembangkan kepemimpinan daerah setempat, dan terkelolanya sumber daya manusia yang ada. Sebab anggota kelompok sasaran tidak saja jadi objek kegiatan, tetapi juga menjadi subjek kegiatan.
- e. Terjadinya proses belajar-mengajar antara sesama warga yang terlibat dalam kegiatan. Sebab kegiatan direncanakan dan dilakukan secara bersama. Hal ini menimbulkan adanya sumbang saran secara timbal balik.

Tiga teknik pemberdayaan masyarakat di atas harus dikelola secara maksimal antara pemerintah, agen (pendakwah) dan masyarakat, supaya menghasilkan kemandirian dan keberdayaan bagi warga lokal. Lebih jelasnya dari pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah dan dikelola para agen (pendakwah) dapat memperoleh beberapa poin penting. Pertama, sasaran dakwah dapat meningkatkan penghasilan bagi keluarga sehingga memiliki kemampuan untuk hidup mandiri. Kedua, sasaran dakwah menjadi individu atau kelompok yang ikut serta dalam proses pemberdayaan

²⁹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, hlm. 113-114.

dimulai dari identifikasi masalah hingga evaluasi. Ketiga, sasaran dakwah memiliki pengetahuan tentang memilih pemimpin yang kredibel dan mampu mengelola aset dan sumber daya manusia yang dimiliki. Dan keempat, umat sasaran dakwah dapat saling belajar dan tukar-menukar informasi dengan sesamanya dalam merencanakan kegiatan.

C. Simpulan dan Rekomendasi

Dakwah bukan sekedar disampaikan melalui ceramah agama kepada sasaran dakwah, tetapi juga dapat dilakukan melalui aksi dan tindakan nyata, yang dikenal dengan dakwah *bilhal*. Dakwah tidak semata meningkatkan kualitas keimanan umat manusia, namun juga harus bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka dari itu, paradigma dakwah pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk mengubah keadaan ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan politik warga pedesaan. Untuk memperbaiki keadaan tersebut dapat dilakukan dengan beragam teknik yaitu teknik non-partisipasi, teknik tokenisme, dan teknik partisipasi/kekuasaan masyarakat.

Selain pemerintah, pendakwah dan masyarakat, organisasi dakwah diharapkan ikut berperan aktif dalam menjembatani dakwah pemberdayaan masyarakat tersebut. Karena, apabila pendakwah secara individu yang bergerak sendiri hasilnya kurang maksimal, harus ada kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan lebih untuk ikut membantu dalam memberdayakan masyarakat yaitu organisasi dakwah. Organisasi dakwah dapat bersinergi dengan organisasi dakwah lainnya supaya tidak terjadi *overlapping* (tumpang tindih) dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Amrullah, (Ed.), *Dakwah Islam dan Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Latihan, Penelitian dan Pengembangan Masyarakat (PLP2M), 1985).
- Aziz, Moh. Ali, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009).
- Aripudin, Acep, *Pengembangan Metode Dakwah: Respon Da'i terhadap Dinamika Kehidupan di Kaki Ciremai*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).
- Damsar & Indrayani, *Pengantar Sosiologi Perdesaan*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Jalaluddin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- Jamaludin, Adon Nasrullah, *Sosiologi Perdesaan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015).
- Ismail, A. Ilyas & Prio Hotman, *Filsafat Dakwah: Rekayasa Membangun Agama dan Peradaban Islam*, (Jakarta: Kencana Prena Media Group, 2011).
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 2011).
- Muhyiddin, Asep & Agus Ahmad Safei, *Metode Pengembangan Dakwah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002).
- _____, "Dakwah Perspektif al-Quran" dalam Muhyiddin (Ed.), dkk., *Kajian Dakwah Multiperspektif: Teori, Metodologi, Problem, dan Aplikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Prijono, Onny S & A.M.W. Pranarka, (Ed.), *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, (Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS), 1996).
- Usman, Sunyoto, *Esai-Esai Sosiologi Perubahan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015).
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003).
- Suhandang, Kustadi, *Ilmu Dakwah: Perspektif Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013).

Suparta, Munzier & Harjani Hefni (Ed.), dkk., *Metode Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).

Soekanto, Soerjono & Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Soetomo, *Pemberdayaan Masyarakat: Mungkinkah Muncul Antitesisnya?*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

Syamsuddin, *Pengantar Sosiologi Dakwah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

Usman, Sunyoto, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).